

Mengetahui akses transportasi tertutup masyarakat sekitar bersama pihak kecamatan bendungan dan dibantu BPBD dan DAMKAR langsung melakukan evakuasi pembersihan dengan menggunakan alat berat. Ada 2 titik rawan longsor yang ada dikecamatan bendungan, yakni didesa srabah dan desa sumurup, namun titik yang terparah ada didesa sumurup ini. Jalan yang tertimbun longsor ini merupakan salah satu jalan alternatif penghubung antar 3 kabupaten yakni antara kabupaten trenggalek ke tulungagung dan trenggalek ke ponorogo. Akibat longsor yang terjadi antrian panjang kendaraan sempat terjadi namun arus lalu lintas sudah kembali normal setelah proses pembersihan selesai.

Pada hari minggu tanggal 9 oktober 2016 Pkl 17.30 Bertempat di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan telah terjadi bencana alam Tanah longsor di dua titik yang berbeda, mengakibatkan 1 rumah roboh dan rusak total dan 1 rumah miring hampir roboh di antaranya:

- a) Di Rt 35/11 Desa Sumurup kec Bendungan, rumah milik Bpk.Sarni umur 65 th terkena longSORan setinggi 5 m dan lebar 10 m kondisi rumah rusak total.
- b) Di Rt 39/12 desa sumurup kec Bendungan. rumah milik Bpk. Samuri umur 56 th.terkenak longSORan tebing setinggi 15 m dan lebar 25 m kondisi rumah miring hampir roboh.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Saat ini, anggaran dana desa yang dibuat langsung untuk kepentingan khusus dalam bidang kebencanaan masih belum ada kebijakannya. Kemudian belum ada yang berpartisipasi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, maka dari itu dibutuhkan seorang yang berhak dan bisa membuat anggaran tersebut sampai dengan menerapkannya. Hal ini akan berakibat akan sulit untuk menjadikan desa sumurup sebagai desa yang tangguh terhadap bencana.

C. Kalender Musim Kebencanaan

Kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh siklus musim atau kalender musim. Dengan mengkaji pola-pola musim maka akan terlihat pula pola kehidupan masyarakat tersebut (lampiran). Tujuan dari kajian kalender ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat supaya untuk berhati-hati. Yakni :

1. Mengetahui keadaan dan pola kegiatan masyarakat, sehingga diperoleh profil kegiatan utama mereka sepanjang tahun.

Tabel 5.2
Kalender Musim Kebencanaan Tahun 2016

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Curah hujan												
Musim kemarau												
Potensi bencana	Bencana alam tanah longsor			Kekeringan						Bencana alam tanah longsor dan tanah gerak		
Kegiatan yang dilakukan pasca bencana	Swadaya atau gotong royong			Tidak ada Swadaya atau gotong royong								
Keterangan		Hujan			Kemarau							

sumber : diperoleh dari hasil forum group discussion bersama anggota TAGANA

Untuk membentuk sebuah desa dimana masyarakatnya tangguh dalam menghadapi bencana bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu dilakukan beberapa fasilitasi untuk memberikan pemahaman dasar tentang bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Desa sumurup sendiri masih belum mengeluarkan kebijakan tentang PRB. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan tentang pentingnya PRB. Maka dari itu peneliti mengajak untuk mulai melakukan PRB dikarenakan daerahnya sendiri termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Kemudian tingginya bahaya dan risiko masyarakat terhadap bencana. Sudah banyak diantara masyarakat yang menjadi korban bencana tersebut. Dan sekarang saatnya untuk melakukan sebuah perubahan.